



**REVISI KE-1 (SATU)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

Nomor : **425** /KPN.W4-U5/RA1.10/VI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**
NIP : 19760321 199903 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**
NIP : 19610402 198203 2003
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIAH SULASTRI DEWI

Dumai, 12 Juni 2025
Pihak Pertama,

MAULIA MARTWENTY INE

**REVISI KE-1 (SATU)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95% 5% 95% 97% 30% 90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen (WA) Rp. 7.682.895.000,-	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana Internal (951) Rp. 654.789.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (051) Rp. 399.289.000,-	100%
					2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053) Rp. 255.500.000,-	100%
		2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) Rp. 6.681.352.000,-	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) Rp. 6.681.052.000,-	2. Layanan Prasarana Internal (971) Rp. 346.754.000,-	1. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (051) Rp. 346.754.000,-	100%
				1. Layanan Umum (962) Rp. 700.000,-	1. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan (051) Rp. 700.000,-	100%
			2. Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	2. Layanan Perkantoran (994) Rp. 6.680.352.000,-	1. Gaji dan Tunjangan (001) Rp. 4.676.644.000,-	100%
					2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) Rp. 2.003.708.000,-	100%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 211.915.000,-	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049) Rp. 211.915.000,-	1. Koordinasi (AEA) Rp. 1.500.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953) Rp. 300.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (051) Rp. 300.000,-	100%
				1. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (001) Rp. 1.500.000,-	1. Dukungan Penyelesaian Perkara (052) Rp. 1.500.000,-	100%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (QBA) Rp. 36.000.000,-	1. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (032) Rp. 36.000.000,-	1. Pos Bantuan Hukum (051) Rp. 36.000.000,-	100%


Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

DIAH SULASTRI DEWI

Dumai, 12 Juni 2025
Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA,


MAULIA MARTWENTY-INE